

KEMISKINAN TRANSIEN DAN MASYARAKAT PEDESAAN PASCA BENCANA

Maulana Kurnia Putra¹

Abstract

This paper study the context of poverty and empowerment efforts during the recovery period in disaster-affected rural communities in Rukem Hamlet, Purworejo Regency and Bobanehena Hamlet, West Halmahera Regency. The purpose of this study is to explain and provide additional perspectives in assisting the community during the recovery process through community empowerment indicators. This research is a case study with a qualitative method with the focus of analysis on mentoring and empowerment activities that become the strength of the post-disaster community to recover from an emergency quickly. The results of this study are: 1) fulfillment of the key elements of post-disaster community empowerment needed for communities to recover faster from transient poverty through mentoring activities; 2) To achieve the level of economic empowerment, community assistance is needed for qualitative problems in stages to make rural communities more empowered. With this research, there is the development of studies related to the performance of social work to respond to the issue of poverty and empowerment of rural communities in a post-disaster context so that program intervention designs can be more comprehensive.

Keywords: *transient poverty; rural community empowerment; post-disaster*

Abstrak

Makalah ini meneliti tentang konteks kemiskinan dan upaya pemberdayaan selama masa pemulihan (*recovery*) di masyarakat pedesaan terdampak bencana di Dusun Rukem, Kabupaten Purworejo dan Dusun Bobanehena, Kabupaten Halmahera Barat. Tujuan penelitian ini menjelaskan dan memberikan perspektif tambahan dalam pendampingan masyarakat selama proses pemulihan (*recovery*) melalui indikator pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini adalah studi kasus dengan metode kualitatif yang fokus analisisnya adalah aktivitas pendampingan dan pemberdayaan yang menjadi kekuatan masyarakat pasca bencana untuk pulih dari masa darurat dengan cepat. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) pemenuhan elemen kunci pemberdayaan masyarakat pasca bencana diperlukan untuk masyarakat pulih lebih cepat dari kemiskinan transien melalui aktivitas pendampingan; 2) untuk mencapai taraf pemberdayaan ekonomi diperlukan pendampingan masyarakat untuk masalah kualitatif secara bertahap untuk menjadikan masyarakat pedesaan lebih berdaya. Dengan penelitian ini, ada pengembangan kajian terkait kinerja pekerjaan sosial untuk merespon isu kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan konteks pasca bencana sehingga rancangan intervensi program dapat lebih komprehensif.

Kata kunci: kemiskinan transien; pemberdayaan masyarakat pedesaan; pasca bencana

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LAZNAS PPPA Daarul Qur'an
maulana@pppa.id

PENDAHULUAN

Pasca MDGs, selanjutnya dunia global memasuki era *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dimulai pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat (Ishartono dan Raharjo, 2016). Saat itu sebanyak 193 negara anggota PBB mengadopsi secara aklamasi dokumen berjudul "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*" yang dicetuskan untuk meneruskan dan memantapkan capaian-capaian MDGs sebelumnya agar langgeng dan berlanjut seterusnya (Ishatono dan Raharjo, 2016).

Sejak saat itu, kemiskinan menjadi isu strategis dan dijadikan agenda prioritas kebijakan bagi pemerintah Indonesia. Menurut Santoso (2018), ketika mendiskusikan masalah kemiskinan, fokus kajian terbelah menjadi dua bagian besar. Pertama di wilayah argumentasi ekonomi dimana penyelesaian masalah mengarah pada perhitungan statistik peningkatan pendapatan dan penurunan pengeluaran. Kedua adalah penjelasan argumentatif data kemiskinan dan mengarah pada perilaku melalui penjelasan antropologis, psikologis, dan sosiologis. Dengan menggunakan pedoman garis kemiskinan, dapat ditemukan dua fenomena kemiskinan, yaitu kemiskinan kronis (*chronic poverty*) dan kemiskinan transien (*transient poverty*).

Di Indonesia, penelitian mengenai kemiskinan masih didominasi oleh penelitian di wilayah kemiskinan kronis daripada kemiskinan transien. Kemiskinan transien adalah dinamika sosial yang dialami oleh rumah tangga maupun individu yang berada di sekitar garis kemiskinan, di atas atau di bawah, dengan membandingkan dua atau lebih periode survey (Santoso, 2018). Posisi garis kemiskinan sangat dinamis tergantung pada perkembangan dan kebutuhan, baik dari sisi pertimbangan ekonomi (*income*) maupun politik (*non income*). Dinamika penetapan garis kemiskinan ini telah memunculkan perbedaan kemiskinan kronis dan kemiskinan transien. Persoalan perumusan kebijakan publik penanggulangan kemiskinan, termasuk penanganan kelompok kemiskinan transien berawal dari penentuan garis batas kategori kemiskinan. Sehingga sangat penting dalam memetakan kemiskinan transien sejauh mana kapasitas masyarakat

untuk berusaha lepas dari kemiskinan dan bertahan hidup di atas garis kemiskinan.

Keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak hanya diukur dari kenaikan taraf hidup masyarakat, tetapi juga perlu mengupayakan sejauh mana pembangunan dapat menumbuhkan kemauan dan kemampuan dari suatu masyarakat mandiri dan berdaya. Tanggung jawab utama pembangunan adalah masyarakat yang berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan baik dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerja sama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan (Widjajanti, 2011). Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri (Sururi, 2015). Sedangkan menurut Jack Rothman (dalam Suharto, 2005) *Three Models of Community Organization Practice*, mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsepsi tentang pemberdayaan masyarakat: (1) pengembangan masyarakat local (*locality development*); (2) perencanaan sosial (*social planning*); dan (3) aksi sosial (*social action*).

Lebih spesifik, Zhu (2015), menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat di pedesaan dengan kekuatan komunalnya melalui beberapa elemen kunci dalam pemberdayaan akan lebih sejahtera dan kuat komunitasnya. yakni: (1) *self-determination*, (2) menciptakan bisnis sosial, (3) mekanisme organisasi dengan partisipasi aktif dan mengembangkan aktor lokal, (4) mengembangkan dan mempertahankan kearifan lokal, lingkungan hidup, dan konteksnya, (5) melatih dan mengembangkan keahlian, gagasan, dan pengetahuan lokal, (6) optimalisasi sumber daya lokal dan asset, (7) membangun jaringan dengan pendukung dari luar masyarakat pedesaan, (8) memberlakukan mekanisme keuangan, kebijakan, hingga sistem infrastruktur desa.

Berdasarkan indikator pemberdayaan Jack Rothman dan Zhu di atas, penelitian ini akan menjelaskan narasi lokal tentang kemiskinan transien di masyarakat akar rumput pasca bencana melalui program pendampingan sosial. Fokus lokasi yang akan menjadi objek penelitian adalah masyarakat Dusun Rukem Kabupaten Purworejo yang telah pulih sejak bencana longsor pada tahun

2016 dan masyarakat Dusun Bobanehena Kabupaten Halmahera Barat yang telah pulih dari gempa bumi pada 2018 lalu. Dalam beberapa studi literatur, cepat pulihnya Dusun Rukem dan Dusun Bobanehena pasca bencana tersebut disertai aktivitas pemberdayaan dan pendampingan masyarakat oleh *Non Government Organization* (NGO) keagamaan dalam kurun waktu 2016-2019. Sehingga penelitian ini akan menjelaskan bagaimana proses pendampingan yang dilakukan dalam proses pemulihan (*recovery*) masyarakat pedesaan pasca bencana berdasarkan elemen kunci pemberdayaan untuk lepas dari kemiskinan transien. Dimana *value of societies* yang diolah dari nilai-nilai budaya dan agama menjadi kekuatan masyarakat pasca bencana untuk pulih dari masa darurat dengan lebih cepat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui studi literatur, observasi lapangan, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Studi literatur dilakukan terkait kemiskinan di Indonesia melalui beberapa referensi terkait di beberapa buku pemberdayaan, situs pusat data Badan Pusat Statistik (BPS), dan laporan kaji dampak yang dilakukan peneliti bersama tim evaluasi program pada tahun 2019. Observasi lapangan dilakukan penulis di beberapa lokasi pemberdayaan dan pendampingan masyarakat pasca bencana di Dusun Rukem, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo dan Dusun Bobanehena, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Sedangkan *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan saat pembuatan *Joint Protocol* Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Forum Zakat (FOZ) di Rumah Gemilang Indonesia Depok, Jawa Barat pada tanggal 10 Oktober 2019 yang dihadiri 27 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dari seluruh Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu antara Maret hingga September 2019. Semua data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah melalui analisis data interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2007). Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdahanan dari beberapa temuan data di lapangan. Reduksi data dilakukan oleh peneliti dengan memilah dan memilih data informasi dari

sumber wawancara informan, observasi, dan pembacaan arsip. Penyajian data dengan penyusunan sekumpulan informasi berupa kategori yang merujuk pada diskursus kemiskinan dan konsep-konsep strategis pemberdayaan masyarakat, sehingga memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Sajian data pada penelitian ini akan berupa kutipan berbagai sumber data. Penarikan simpulan dan verifikasi setelah penyajian data, dideskripsikan, dianalisis, serta diberikan tafsir (intepretasi) yang logis terhadap data-data tersebut. Setelah tahap ini selesai dilakukan, peneliti mulai menyusun data akhir ke dalam bentuk laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Elemen kunci aktivitas pemberdayaan masyarakat pasca bencana diperlukan untuk masyarakat pulih lebih cepat dari kemiskinan transien. Kecepatan pemulihan hingga masyarakat pedesaan menjadi lebih berdaya di Dusun Rukem dan Dusun Bobanehena berjalan tidak secara organis, melainkan melalui intervensi pendampingan lembaga swadaya masyarakat dengan dukungan filantropi berbasis identitas keberagaman. Pendekatan melalui sosial keagamaan berfokus pada aktivitas Mushola Miftahul Huda di Dusun Rukem dan Rumah Tahfidz di Dusun Bobanehena menjadi pintu masuk pendampingan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Elemen kunci pemberdayaan pasca bencana secara garis besar berlaku pada masyarakat di Dusun Rukem dan Dusun Bobanehena melalui tahapan *self determination*; menciptakan bisnis sosial untuk memperluas lapangan kerja dan pendapatan; organisasi dengan partisipasi aktif dan mengembangkan aktor lokal, mengembangkan dan mempertahankan kearifan lokal, lingkungan hidup, dan konteksnya; melatih dan mengembangkan keahlian, gagasan, dan pengetahuan lokal; optimalisasi sumber daya lokal dan asset; membangun jaringan dengan pendukung dari luar masyarakat pedesaan; memberlakukan mekanisme keuangan, kebijakan, hingga sistem infrastruktur desa.

Pemberdayaan masyarakat pedesaan pasca bencana di Dusun Rukem dan Dusun Bobanehena berfokus pada tingkat lokal yang berfokus pada partisipasi

aktif masyarakat di kedua dusun untuk sadar potensi dan saling menguatkan membangun solidaritas dari pendekatan keagamaan. Perencanaan intervensi pendampingan dalam pengembangan masyarakat dilakukan berfokus pada kebutuhan dasar pada awal dan potensi masyarakat setempat pada tahapan selanjutnya. Selain itu, komunitas atau organisasi di tingkat lokal juga perlu dilibatkan sebagai *asset building* dalam upaya pengembangan masyarakat, seperti yang dilakukan di Mushola Miftahul Huda di Dusun Rukem. Selain itu, dalam merencanakan pengembangan masyarakat juga penting melihat aspek modal fisik, modal finansial, modal lingkungan, modal teknologi, dan modal sosial baik di Dusun Rukem dan Dusun Bobanehena.

Pembahasan

Pengembangan Masyarakat Lokal di Dusun Rukem dan Dusun Bobanehena

Perencanaan Pengembangan Masyarakat Lokal

Dalam proses pengembangan masyarakat, pembangunan sering kali dianggap sebagai solusi terhadap berbagai masalah yang muncul dalam lingkup masyarakat itu sendiri, khususnya pada desa-desa yang secara potensi sangat kaya tetapi minim sumber daya untuk pengembangannya. Secara konsep, pembangunan sejatinya memuat unsur-unsur perubahan. Sehingga pembangunan sangat erat kaitannya dengan bagaimana perubahan itu dilakukan dan diimplementasikan dengan baik dengan pendekatan pertumbuhan, pemerataan, tata ekonomi baru, kebutuhan pokok dan pendekatan kemandirian masyarakat yang berdaya.

Dalam merencanakan masyarakat berdaya di tingkat lokal, khususnya di Dusun Rukem, Kabupaten Purworejo dan Dusun Bobanehena, Kabupaten Halmahera Barat tentu diperlukan strategi pembangunan masyarakat lokal. Yaitu dengan perencanaan pemberdayaan yang bertujuan untuk kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal melalui partisipasi aktif dari anggota masyarakat desa secara langsung. Karena masyarakat desa harus dipandang bukan sebagai sistem klien bermasalah melainkan dilihat sebagai masyarakat dengan potensi dan daya yang memang belum sepenuhnya dikembangkan.

Perencanaan pengembangan masyarakat ini juga dilakukan dengan melihat tingkat kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Selain itu, komunitas atau organisasi di tingkat lokal juga perlu dilibatkan sebagai *asset building* dalam upaya pengembangan masyarakat. Selain itu, dalam merencanakan pengembangan masyarakat juga penting melihat aspek modal fisik, modal finansial, modal lingkungan, modal teknologi, modal manusia, dan modal sosial baik di Dusun Rukem dan Dusun Bobanehena.

Perencanaan Sosial

Perencanaan sosial menjadi upaya peningkatan partisipasi sejak dini melalui komunitas atau organisasi di tingkat lokal, dalam hal ini Dusun Rukem dan Dusun Bobanehena. Artinya, setiap proses pembangunan terutama dalam hal pengambilan keputusan, menetapkan tidakan, dan memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, tingkat buta huruf, kesehatan masyarakat yang buruk, tingkat pendidikan rendah, dan lain-lain. Sehingga perencanaan sosial ini lebih fokus pada tujuan untuk memecahkan dan memberikan solusi atas masalah sosial sehingga membawa perubahan-perubahan sosial ke arah yang lebih baik di Dusun Rukem dan Dusun Bobanehena.

Aksi Sosial

Aksi sosial dalam pengembangan masyarakat lokal juga sangat penting. Aksi sosial dilakukan dengan tujuan dan sasaran utamanya adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian sumber daya dan pengambilan keputusan. Pendekatan aksi sosial ini diperlukan dengan berorientasi pada tujuan proses dan tujuan hasil, artinya memberdayakan masyarakat diorganisasikan melalui proses. Aksi sosial disini merupakan kegiatan yang terorganisir untuk mencapai perubahan dalam rangka memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, mengoreksi ketidakadilan atau meningkatkan kualitas hidup manusia. Aksi sosial ini tentu membutuhkan unsur kolaborasi dari *stakeholder*, lembaga non pemerintah dalam hal ini lembaga pengelola dana sosial Islam dan peran aktif masyarakat lokal setempat. Sehingga tujuan dari aksi sosial ini menjadi pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang kedepannya.

Merumuskan Pemberdayaan di Dusun Rukem dan Bobanehena

Kondisi Pasca Bencana

Di Indonesia, di beberapa masyarakat pedesaan yang dikunjungi penulis dalam rentang waktu 2016-2019, kemiskinan transien sangat lekat pada masyarakat pedesaan pasca bencana. Berbagai narasi hadir dengan kompleksitasnya masing-masing. Dimulai dari Dusun Bobanehena, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat yang dilanda gempa besar pada November 2015. Selain Dusun Bobanehena, pada Juni 2016, tanah longsor melanda masyarakat Dusun Rukem, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sedikitnya, ada sekitar 40 lebih jiwa meninggal dunia dalam tanah longsor tersebut. Dusun Rukem tidak diliput media karena sulitnya akses dan berakibat minimnya penyaluran bantuan pada masa tanggap darurat.

Dusun Rukem berada di lereng bukit Pajangan di Kabupaten Purworejo yang masih dalam jalur perbukitan Menoreh. Sebagian besar warganya hidup bergantung pada alam dan mayoritas kepala keluarga bekerja sebagai buruh tukang, ibu-ibu kebanyakan menjadi ibu rumah tangga dan buruh, sedangkan para remaja yang mayoritas sudah bekerja hanya tamatan SMP dan SMA. Pendapatan rata-rata keluarga di Dusun Rukem pada tahun 2019 antara Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- per bulan dengan beban tanggungan setiap Kepala Keluarga (KK) sebanyak 5-6 orang tiap rumah tangga atau setara dengan Rp. 416.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- per kapita/bulan.

Sejak gempa pertama kali terjadi pada November 2015, hingga awal Desember 2015 terjadi 800 kali gempa susulan di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Ratusan rumah rubuh dan 9.610 orang kehilangan tempat tinggal. Dingin malam di pengungsian, minimnya bantuan logistic, medis dan *trauma healing* mendera para pengungsi. Dusun Bobanehena, lokasi dengan kerusakan akibat gempa terparah, tercatat 157 rumah, 1 sekolah, dan 2 masjid rusak berat.

Dua tahun setelah bencana longsor, tepatnya pada 2018, masyarakat Dusun Rukem bangkit dari trauma longsor dan bencana alam. Mushala Miftahul Huda dan masyarakat Dusun Rukem kini lebih aktif dalam aktivitas keagamaan, sosial

kemanusiaan, dan peningkatan ekonomi kampung melalui aktivitas kewirausahaan sosial yang dikelola oleh pengurus Mushala Miftahul Huda. Pengelolaan kewirausahaan sosial tersebut ditujukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial masyarakat. Termasuk dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui dana zakat yang diproduktifkan di bawah pengelolaan pengurus Mushala Miftahul Huda. Kesadaran bersama warga Dusun Rukem di bawah kekuatan sosial mushala menjadi narasi khas yang menjadi spirit utama aktivitas pemberdayaan dan kewirausahaan sosial yang dirancang menjadi jawaban atas permasalahan kemiskinan dengan spirit komunal masyarakat pedesaan.

Tiga tahun setelah bencana gempa bumi, tepatnya pada 2018, masyarakat Dusun Bobanehena pun telah pulih dari dampak pasca bencana. Setelah kebutuhan dasar hunian terpenuhi dengan gotong royong pembangunan melalui optimalisasi dana zakat dan sedekah, masyarakat Dusun Bobanehena mulai menata kembali kehidupan sosialnya yang berbasis keagamaan dan kebersamaan lebih kuat. Kehadiran pendamping masyarakat dari satu lembaga swadaya masyarakat berbasis keagamaan membuat solidaritas masyarakat menjadi lebih kuat.

Melalui dua konteks masyarakat pedesaan yang menjadi fokus penelitian di atas, kondisi lapangan menjelaskan bahwa fenomena kemiskinan transien membuka perspektif dan peluang analisis baru tentang pengembangan potensi sebagai respon isu kemiskinan pada masa depan, yakni pedesaan menjadi potensi kemajuan sosial untuk menekan dan melepaskan label kemiskinan di masyarakat pedesaan, terlebih di masyarakat pedesaan pasca bencana.

Merumuskan Pemberdayaan

Pada aktivitas pemberdayaan masyarakat pasca bencana di Dusun Rukem, Desa Sidomulyo, Purworejo, Jawa Tengah menggunakan pendekatan bisnis sosial untuk meningkatkan produktivitas masyarakat agar kemandirian masyarakat dalam mengelola kampungnya dapat segera terwujud. Pada Januari 2019, Mushala

Miftahul Huda, lokasi sentra dakwah Islam tiga kampung di perbukitan Pajangan, Kabupaten Purworejo yang dulunya bekas longsor telah memiliki sokongan bisnis tambahan selain usaha keripik talas, yaitu budidaya domba untuk mengoptimalkan dakwah sosial ekonomi berbasis mushala yang dapat diakses dan dikelola oleh warga Dusun Rukem secara partisipatif dan mandiri.

Dengan beberapa elemen kunci pemberdayaan yang dipaparkan oleh Zhu (2015), maka aktivitas yang dilakukan masyarakat Dusun Rukem pasca bencana longsor dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 2. Elemen Kunci Pemberdayaan Masyarakat Dusun Rukem Pasca Bencana Longsor Tahun 2011

No.	Elemen Kunci Pemberdayaan Masyarakat	Pemenuhan Elemen Kunci	Keterangan
1	<i>Self Determination</i>	√	LSM mendampingi dalam analisis masalah lokal dan potensi yang dimiliki. Warga diarahkan untuk mengambil keputusan sendiri untuk program pemberdayaannya
2	Menciptakan bisnis sosial untuk memperluas lapangan kerja dan pendapatan	√	sudah terbentuk tiga unit usaha di bawah Mushala Miftahul Huda yang digerakkan oleh warga
3	Mekanisme organisasi dengan partisipasi aktif dan mengembangkan aktor lokal	√	pembentukan embrio koperasi oleh warga dan adanya pelatihan untuk pengembangan kapasitas
4	Mengembangkan dan mempertahankan kearifan lokal, lingkungan hidup, dan	√	bisnis sosial untuk mengembangkan potensi yang ada

	konteksnya		
5	Melatih dan mengembangkan keahlian, gagasan, dan pengetahuan lokal	√	Peningkatan kapasitas di bidang manajemen, keuangan, peternakan, hingga dakwah
6	Optimalisasi sumber daya lokal dan asset	√	Rintisan usaha mikro di bawah Mushola Miftahul Huda adalah upaya mengoptimalkan potensi lokal yaitu talas, domba/kambing, vanili, cengkeh, dan lain-lain.
7	Membangun jaringan dengan pendukung dari luar masyarakat pedesaan	√	terus didampingi dan dilakukan monitoring oleh LSM
8	Memberlakukan mekanisme keuangan, kebijakan, hingga sistem infrastruktur desa.	proses	sistem keuangan dan manajemen belum sepenuhnya berjalan, karena masih dalam tahap pendampingan bersamaan dengan aktivitas program pemberdayaan ekonomi

Muhammad Yunus menerangkan bahwa bisnis sosial dibangun tidak untuk capaian tujuan pribadi, tetapi untuk tujuan-tujuan sosial yang spesifik. Bisnis sosial harus meneliti dan memetakan perihal kemanusiaan dan kebutuhan-kebutuhannya yang beragam, sehingga bisnis sosial dapat menghasilkan tidak hanya keuntungan personal saja, melainkan juga menghadirkan bisnis yang menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungannya (Yunus dan Weber, 2007). Bisnis sosial pada dasarnya menjadi faktor sebab (*cause-driven*) bukan faktor keuntungan (*profit-driven*) dengan segala potensinya agar menjadi agen perubahan sosial dalam aktivitasnya dan diwajibkan memiliki peta perencanaan (*road map*) yang bersifat jangka panjang (*long-term*).

Sedangkan di Dusun Bobanehena, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat pasca gempa bumi pada 2015, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan mendesak (hunian) dan pendidikan di bidang agama, khususnya Al-Qur'an. Kegiatan penguatan dan pemberdayaan merupakan kegiatan yang dilakukan agar program bantuan yang diberikan dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat secara berkesinambungan bagi masyarakat. Kegiatan pada program penguatan dan pemberdayaan ini biasanya berupa kegiatan non fisik seperti pendirian hunian, pendirian Rumah Tahfidz, pendirian radio komunitas, hingga pengadaan kapal ikan.

Tabel 3. Elemen Kunci Pemberdayaan Masyarakat Dusun Bobanehena Pasca Bencana Gempa Tahun 2015

No.	Elemen Kunci Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemenuhan Elemen Kunci	Keterangan
1	<i>Self Determination</i>	√	LSM mendampingi dalam analisis masalah lokal dan potensi yang dimiliki. Warga diarahkan untuk mengambil keputusan sendiri.
2	Menciptakan bisnis sosial untuk memperluas lapangan kerja dan pendapatan	-	Dibutuhkan waktu lebih untuk melatih kapasitas organisasi masyarakat dan fokus pendampingan untuk meningkatkan pendapatan secara bersama-sama
3	Mekanisme organisasi dengan partisipasi aktif dan mengembangkan aktor lokal	√	Telah muncul aktor lokal yang menjadi pengurus program Rumah Tahfidz yang juga menjadi penggerak masyarakat Dusun Bobanehena di bidang sosial keagamaan

4	Mengembangkan dan mempertahankan kearifan lokal, lingkungan hidup, dan konteksnya,	√	Masyarakat sudah bertahan dengan sumber daya alam yang ada: ikan, pala, rempah-rempah
5	Melatih dan mengembangkan keahlian, gagasan, dan pengetahuan lokal	-	Membutuhkan waktu pendampingan yang lebih karena karakter masyarakat yang cenderung lebih resisten terhadap perubahan
6	Optimalisasi sumber daya lokal dan asset	√	Kaderisasi dan keberlanjutan pendampingan masyarakat dilanjutkan oleh remaja dan orang lokal Bobanehena yang berpusat pada aktivitas lingkungan program Rumah Tahfidz
7	Membangun jaringan dengan pendukung dari luar masyarakat pedesaan	√	terus didampingi dan dilakukan monitoring oleh LSM
8	Memberlakukan mekanisme keuangan, kebijakan, hingga sistem infrastruktur desa.	√	Kapasitas organisasi masyarakat ditumbuhkan melalui pelatihan dan penerapan manajemen program Rumah Tahfidz, termasuk pada rapat-rapat penentuan program dusun yang berpusat di lokasi Rumah Tahfidz.

Dua konteks masyarakat pedesaan pasca bencana di atas memberikan dua jalan dalam pemberdayaan masyarakat dimana potensi lokal masyarakat bisa dioptimalkan atau tidak untuk menuju kemandirian. Hasil dari FGD *Joint Protocol* Pemberdayaan

Masyarakat oleh Forum Zakat (FOZ) pada 10 Oktober 2019 menyepakati bahwa kemiskinan di bidang ekonomi yang diukur secara kuantitatif juga dilingkupi permasalahan yang bersifat kualitatif yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan dakwah yang bersifat jangka panjang (*long term*). Dalam *Joint Protocol* ini juga disepakati bahwa sebelum mencapai taraf pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan dan pendampingan untuk masalah-masalah yang bersifat kualitatif dirasa sangat perlu dilakukan. Pendampingan dan pemberdayaan di masalah-masalah kualitatif ini biasanya menjadi program-program bertahap/anak tangga menuju pengentasan kemiskinan, terlebih di masyarakat pedesaan agar tahan terhadap kemiskinan transien akibat bencana alam. Akhirnya, elemen kunci yang ditawarkan Zhu (2015), pengayaan cara pandang kemiskinan dan model pemberdayaan masyarakat pedesaan pasca bencana di atas diharapkan dapat menjadi satu tawaran yang komprehensif dalam melihat dan menempatkan aktivitas pemberdayaan masyarakat pada konteks dan kompleksitasnya.

KESIMPULAN

Elemen kunci aktivitas pemberdayaan masyarakat pasca bencana diperlukan untuk masyarakat pulih lebih cepat dari kemiskinan transien. Kecepatan pemulihan hingga masyarakat pedesaan menjadi lebih berdaya di Dusun Rukem dan Dusun Bobanehena berjalan tidak secara organis, melainkan melalui intervensi pendampingan lembaga swadaya masyarakat dengan dukungan filantropi berbasis identitas keberagaman. Pendekatan melalui sosial keagamaan berfokus pada aktivitas *Mushola Miftahul Huda* di Dusun Rukem dan *Rumah Tahfidz* di Dusun Bobanehena menjadi pintu masuk pendampingan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Elemen kunci pemberdayaan pasca bencana secara garis besar berlaku pada masyarakat di Dusun Rukem dan Dusun Bobanehena melalui tahapan *self determination*; menciptakan bisnis sosial untuk memperluas lapangan kerja dan pendapatan; organisasi dengan partisipasi aktif dan mengembangkan aktor lokal, mengembangkan dan mempertahankan kearifan lokal, lingkungan hidup, dan konteksnya; melatih dan mengembangkan keahlian, gagasan, dan pengetahuan lokal; optimalisasi sumber daya lokal dan asset; membangun jaringan dengan pendukung dari luar masyarakat pedesaan; memberlakukan mekanisme keuangan, kebijakan, hingga sistem infrastruktur desa.

Di masyarakat Dusun Rukem, seluruh elemen kunci pemberdayaan masyarakat telah dilakukan kecuali elemen pemberlakuan mekanisme keuangan, kebijakan, dan sistem infrastruktur desa yang masih dalam proses pendampingan dan belum optimal dilakukan. Inisiasi membangun bisnis sosial di bawah pengelolaan Mushola Miftahul Huda menjadi bukti dinamika pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi alam yang sudah tersedia seperti keripik talas, ternak domba/kambing, vanili, cengkeh, dan lain-lain. Serta inisiasi pembentukan koperasi bersama menjadi bukti potensi partisipasi aktif dan *self determination* masyarakat Dusun Rukem setelah bencana.

Di masyarakat Dusun Bobanehena, seluruh elemen kunci pemberdayaan masyarakat telah dilakukan kecuali dua elemen kunci, yaitu menciptakan bisnis sosial untuk memperluas lapangan kerja dan pendapatan serta elemen melatih dan mengembangkan keahlian, gagasan, dan pengetahuan lokal. Dua elemen kunci pemberdayaan masyarakat yang belum dilakukan dikarenakan dibutuhkan waktu dan intervensi program yang lebih panjang untuk melatih kapasitas organisasi masyarakat dan fokus pendampingan untuk meningkatkan pendapatan secara bersama-sama. Masyarakat Dusun Bobanehena lebih mudah diorganisasikan oleh aktor lokal pada aktivitas-aktivitas sosial keagamaan yang telah menjadi narasi lokal sebelumnya. Sehingga elemen pemberdayaan dalam melatih dan mengembangkan keahlian, gagasan, dan pengetahuan lokal membutuhkan waktu pendampingan yang lebih lama karena karakter masyarakat yang cenderung lebih resisten terhadap perubahan.

Aktivitas pemberdayaan masyarakat pedesaan pasca bencana di Dusun Rukem dan Dusun Bobanehena berfokus pada tingkat lokal yang berfokus pada partisipasi aktif masyarakat di kedua dusun untuk sadar potensi dan saling menguatkan membangun solidaritas dari pendekatan keagamaan. Perencanaan intervensi pendampingan dalam pengembangan masyarakat dilakukan berfokus pada kebutuhan dasar pada awal dan potensi masyarakat setempat pada tahapan selanjutnya. Selain itu, komunitas atau organisasi di tingkat lokal juga perlu dilibatkan sebagai *asset building* dalam upaya pengembangan masyarakat, seperti yang dilakukan di Mushola Miftahul Huda di Dusun Rukem. Selain itu, dalam merencanakan pengembangan masyarakat juga penting melihat aspek modal fisik, modal finansial, modal lingkungan, modal teknologi, dan modal sosial baik di Dusun Rukem dan Dusun Bobanehena.

Di masyarakat pedesaan pasca bencana di Dusun Rukem dan Dusun Bobanehena membangun konsep pemberdayaan masyarakatnya tidak hanya melihat satu aspek ekonomi saja. Selain aspek ekonomi, pemberdayaan masyarakat pedesaan pasca bencana justru lebih membutuhkan rancangan konsep pemberdayaan yang lebih komprehensif di bidang sosial, ekonomi, dan organisasional yang lebih mengutamakan faktor lokal yang menjadi elemen kunci pemberdayaan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, organisasi masyarakat, dan lain-lain seperti yang ditawarkan oleh Zhu (2015).

Hasil dari *Focus Group Discussion (FGD) Joint Protocol* Pemberdayaan Masyarakat oleh Forum Zakat (FOZ) pada 10 Oktober 2019 ditemukan bahwa kemiskinan di bidang ekonomi yang diukur secara kuantitatif juga dilingkupi permasalahan yang bersifat kualitatif yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan dakwah yang bersifat jangka panjang (*long term*). Dalam berbagai literatur, cara pandang pada kemiskinan di berbagai referensi terbaru sudah mulai mengalami kompleksitas tersendiri yang juga menganalisis konteks politik, kebencanaan, hingga isu kapasitas modal sosial masyarakat. Dalam *Joint Protocol* ini juga disepakati bahwa sebelum mencapai taraf pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan dan pendampingan untuk masalah-masalah yang bersifat kualitatif dirasa sangat perlu dilakukan. Pendampingan dan pemberdayaan di masalah-masalah kualitatif ini biasanya menjadi program-program bertahap/anak tangga menuju pengentasan kemiskinan transien, terlebih di masyarakat pedesaan pasca bencana, menuju pada masyarakat yang lebih berdaya dan keberlanjutan. Diharapkan, ke depannya ada pengembangan terkait kinerja pekerjaan sosial untuk merespon isu kemiskinan, pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan konteks spesifik sehingga rancangan intervensi dapat lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alamsyah, Cipi Yusrun. 2015. *Praktik Pekerjaan Sosial Generalis: Suatu Tuntunan Intervensi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- El-Gack, Nawal. 2013. *Rural Development and Microfinance in Sudan: with Special Attention in Community Participation*. Edwin Mellen Press: New York

- Fink, Mathias. Stephan Loidl and Richard Lang. 2013. *Community-Based Entrepreneurship and Rural Development: Creating Favourable Conditions for Small Business in Central Europe*. Routledge Taylor and Francis Group: Oxon
- Ife, Jim. 2002. *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalization*. Pearson Education: Australia
- Kartasasmita, Ginanjar, 1997, *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Kirst-Ashman, K.K., and G.H. Hull Jr.. 2009. *Generalist Practice with Organizations and Communities*. Brooks/Cole: Bellmon
- Moleong, Lexy J.. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Nasikun. 2001. Diktat Mata Kuliah. Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Payne, Malcomm. 2016. *Teori Pekerjaan Sosial Modern*. Samudra Biru: Yogyakarta
- Rahardjo. 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Ravallion, Martin. Jyotsna Jalan. 2008. *Is Transient Poverty Different? Evidence for Rural China*. Journal of Development Studies
- Chambers, Robert. 1992. *Participatory Rural Appraisal: Memahami Desa Secara Partisipatif*. Kanisius: Yogyakarta.
- Santosa, Iman. 2018. *Pengembangan Masyarakat Berbasis Sumberdaya Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, Djonet. 2018. *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan yang Terabaikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Setiadi, Elly M., dan Usman Kalip, (2011), *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sherraden, Michael. 2006. *Asset Untuk Orang Miskin*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Singarimbun, M. & Soffian, E. 1989. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES: Jakarta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Usman, Sunyoto. 2008. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yunus, Muhammad. 2007. *Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism*. Public Affairs: New York.
- Zastrow, Charles. 2004. *Introduction to Social Work and Social Welfare*. Brooks/Cole: Bellmon.
- Zhu, Ying (ed.). 2015. *Transforming Rural Communities in China and Beyond*. New York: Springer.

Jurnal

- Firmansyah, Hairi. 2012. Tingkat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Agribisnis Perdesaan*, vo.2, no.1, hal.53-67.
- Ishatono, Santoso Tri Raharjo. 2016. Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. *Share: Social Work Journal*, vol.6, no.2, hal.154-272.
- Nakagawa, Yuko, Rajib Shaw. 2004. *Social Capital: a Missing Link to Disaster Recovery*. *International Journal Of Mass Emergencies and Disasters*, UNCRD.
- Nora, Vivi Yulia. 2018. Moral Ekonomi Petani Miskin di Jorong Tabek Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dan Implikasinya Terhadap Pengentasan Kemiskinan. *Ekonomika Syariah: Journal of Economics Studies*, vol.2, no,1, hal.37-54.
- Paryanto, Rico dkk. 2019. Merumuskan Potensi dan Tawaran Pemberdayaan: Studi Lapangan Petani Salak dan Gula Merah di Dusun Cungkup, Desa Banyuadem. *Prosiding Konferensi Pengabdian Masyarakat*, vol.1, hal.353-356.
- Prasojo, E. 2004. *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(2): 10–24.
- Sururi, Ahmad. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *SAWALA: Jurnal Administrasi Negara*, vol.3, no.2, hal.1-25.
- Widjayanti, Kesi. 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol.12, no.1. hal.15-27.

Report

Beik, Irfan Syauqi. Arsyianti, LD. 2015. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Bogor: IPB Press dalam proposal penelitian “Analisis Keragaan dan Dampak Program Kampung Qur’an” yang dilakukan oleh PPPA Daarul Qur’an dan CI-BEST IPB, Mei 2019

UNSDSN, *Global Profile of Extreme Poverty Report Prepared By Sustainable Development Solution Network 15 Oktober 2012* Hal.1-2 Diakses dari <http://unsdsn.org/wpcontent/uploads/2014/02/121015-Profile-of-ExtremePoverty.pdf> (Diakses Padang 29 Juni 2021 Pukul 08.26)

Internet

<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>

<https://katadata.co.id/analisisdata/2018/07/28/realitas-di-balik-keberhasilan-menekan-angka-kemiskinan>

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/31/101342926/membandingkan-angka-kemiskinan-dari-era-soeharto-hingga-jokowi>

<http://keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/>

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/19/120646326/kemiskinan-menurun-tapi-kualitas-hidup-belum-meningkat>

<https://pppa.or.id/detailarsipberita/2017/1/6873/Geliat-Kampung-Qur'an-Rukem>

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/01/08/pkyjuo399-kampung-quran-rukem-mulai-merintis-bisnis-sosial>